

Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014

Bambang Arianto*

Abstract

This article describes how the presidential contestation in 2014 was characterized by the presence of political volunteers. Here political volunteers is defined as a manifestation of strengthening active participation of citizens in promoting substantive democracy. This article argues that the rise of a new social movement has brought a tradition of voluntarism in politics. In addition he voluntarism has transformed the values of patrimonial political and oligarchy onto active popular voluntarism and participatory. The political volunteers who employed offline and online medium have clearly increased public participation in Indonesia. This article has also argued the presence of political volunteers has positively contributed to development of extra parliamentary democracy model.

Keywords :

volunteers politics; public participation; extra parliamentary.

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana kontestasi presidensial 2014 yang diwarnai oleh kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam demokrasi substansial. Artikel ini berpendapat bahwa kebangkitan gerakan sosial telah melahirkan tradisi voluntarisme dalam politik. Selain itu voluntarisme juga turut mentransformasi nilai-nilai politis yang bernuansa patrimonial dan oligarkis menjadi voluntarisme dan partisipatoris. Relawan politik yang bergerak secara *offline* dan *online* dapat meningkatkan partisipasi publik. Artikel ini juga berpendapat bawah kehadiran relawan politik secara sangat positif berkontribusi terhadap pembangunan model demokrasi ekstra parlementer.

Kata Kunci :

relawan politik; partisipasi publik; ekstra parlementer.

* Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta.
Email: bulaksumur4@yahoo.com

Pendahuluan

Pesta rakyat¹ yang digelar setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, seolah ingin menunjukkan bahwa kemenangan Jokowi-JK adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan yang didapat dari hasil kerja para relawan politik. Kesuksesan ini menjadi penanda awal atas kemenangan demokrasi partisipatoris. Demokrasi partisipatoris yakni demokrasi yang lebih memberikan perluasan akan partisipasi publik dengan basis utama atas kepedulian dan persoalan publik. Namun, tentunya partisipasi efektif yang dimaksud adalah partisipasi yang memiliki kekuatan tawar yang riil, terbuka dan kompetitif dimana publik dapat mengungkapkan pilihan-pilihannya dengan baik dan tentunya diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan.

Perluasan partisipasi publik ini diharapkan dapat memunculkan kembali kekuatan-kekuatan sosial non-partai yang selama ini tergerus oleh dominasi kaum oligarki dan arus utama partai politik. Alhasil, dominasi ini seringkali menyebabkan medium interaksi diruang publik semakin mengecil. Selain itu, demokrasi partisipatoris turut dipengaruhi oleh relasi media massa terutama media cetak dan media sosial--yang bahu membahu turut memberikan sosialisasi dan komunikasi politik dengan baik. Relawan politik dalam konteks ini

tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang dimobilisasi, sebab partisipasi yang lahir adalah partisipatif sukarela (otonomi) baik melalui aksi jalanan (*offline*) dan *online*.

Hal itu juga terjadi pasca kontestasi presidensial 2014. Dengan tingginya eskalasi politik antar koalisi di parlemen dan adanya wacana mengagalkan pelantikan Jokowi-JK, telah menyulut relawan politik menyambut pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan "*Gerakan Dua Puluh Oktober*" dengan melibatkan kurang lebih 400 ribu orang (*The Jakarta Post*, 2014).² Hal itu ditujukan sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur para relawan politik terhadap kemenangan Jokowi-JK. Itulah yang mendorong mereka mengawal segala proses yang bersifat seremonial pada pelantikan Jokowi-JK.

Dalam historiografi politik, istilah relawan (*volunteer*) dikembangkan semenjak tahun 1755 oleh seorang Perancis M. Fr Voltaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Tugasnya adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan altruistik untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Istilah relawan diambil dari bahasa Jerman "*aktivismus*" yang muncul pada akhir perang dunia pertama. Istilah ini kemudian digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut disebut "*aktivisme*". Aktivisme ini merupakan bagian dari ekspresionisme, yang saat itu memiliki nilai politik sangat kuat. Biasanya *aktivismus* dihubungkan dengan Kurt Hiller, pengarah organisasi *Neuer Club* yang menaungi para penyair ekspresionis awal; maupun Franz

¹ Pesta rakyat yang digelar pada 20 oktober 2014, merupakan pesta yang tidak semata menghamburkan sesuatu secara berlebihan apalagi bersenang-senang. Dalam pesta itu, segala doa dan harapan disematkan. Pemotongan tumpeng sebagai simbol keselamatan dilakukan. Saat di atas panggung pesta rakyat di Monas, Jokowi memberikan potongan tumpeng pertama kepada seorang wanita, Siti Mugiyah, yang belakangan diketahui sebagai sopir taksi dan penopang hidup keluarga. Pesta rakyat ini mengingatkan kita akan jejak-jejak kebudayaan manusia Indonesia yang dibangun di atas kesadaran kohesi kolektif, kerja sama, dan saling menghargai. Pesta rakyat yang digelar ini tidak bertujuan mencari uang atau materi, melainkan demi persaudaraan dan kasih sayang antarsesama (Setiawan, 2014).

² *People's Movement on Oct. 20* — initially intended solely to see the inauguration through without a hitch. More than 40,000 people were involved in inauguration festivities, the first such occurrence in Indonesian history. *The Jakarta Post*. (2014). Jokowi-s-volunteers-continue-movement. html. (Online), (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/23>, diakses 25 Desember 2014)

Pfemfert, pendiri majalah *Die Aktion* pada 1911 yang sangat politis. Dalam berbagai pengertian itu, kaum militan maupun *aktivismus* akhirnya dapat dikatakan sebagai bagian dari relawan (*volunteer*) (Suryadi, 2014).³

Kehadiran relawan politik pada kontestasi presidensial 2014 berbeda dengan sejarah awal kelahiran voluntaristik tersebut di atas. Pada 2014, relawan politik bukan bagian dari anggota partai politik. Kehadiran para relawan bukan karena daya tarik partai politik-melainkan kepada politik nilai yang melampaui kepentingan partai. Bahkan, kehadiran relawan politik dapat disinergikan dengan tim sukses pemenangan kampanye sebuah partai politik-karena fungsi mobilisasi yang lebih masif.

Menurut Savirani (2015)⁴, relawan politik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, relawan yang berasal dari mantan aktivis yang terlibat dalam kisaran tahun 1990-an atau lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. *Kedua*, adalah aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah mulai dari gerakan anti-korupsi, petani dan kelompok masyarakat adat. *Ketiga*, adalah seniman dan orang-orang di sektor kreatif. Kelompok pertama dan kedua memiliki agenda politik, namun sayangnya tidak memiliki massa yang jelas. Berbeda dengan kelompok ketiga yang tidak memiliki agenda politik tetapi memiliki banyak jejaring massa dari semua lapisan masyarakat. Hal itu disebabkan bekal popularitas yang dimiliki oleh para artis dan seniman sehingga dapat menarik lebih banyak pendukung dan pengikut.

Artinya, berbagai aktivitas tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama. Istilah relawan selama ini muncul dan populer hanya dalam aksi-aksi sosial—yang dengan sukarela menyumbangkan dirinya untuk bekerja

dengan tenaga dan pikiran tanpa berharap keuntungan materi apapun. Dalam hal ini para *volunteer* sering bersikap proaktif dan bukan reaktif dalam membantu kelompok atau organisasi guna melahirkan masyarakat yang sejahtera (Wilson 2000, hal. 216, Wilson 2012). Pada akhirnya jiwa yang dimiliki para relawan dapat menjadi aspek kunci dari masyarakat sipil dalam upaya pelebagaan demokrasi yang lebih partisipatoris (Bekkers 2005; Becker dan Dhingra, 2001).

Dalam kontestasi presidensial 2014 tercatat ada 1.248⁵ organisasi relawan politik yang mengorganisasikan diri sendiri dengan sistem kemandirian (*self help*) maupun sokongan pihak lain. Fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik sipil yang menandai kembalinya partisipasi publik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa sekat agama, etnis atau ras (*primordialisme*). Relawan politik ini kemudian menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun. Disini kepercayaan (*trust*) sangat diperlukan guna membentuk integrasi sosial, antara *citizen* dan lembaga-lembaga demokratis yang dinamis dalam sebuah asosiasi (Cohen, 1999).

Artikel ini berpendapat bahwa relawan politik hadir dalam konstestasi presidensial 2014, disebabkan oleh lemahnya peran partai politik sebagai rahim ideologis bagi calon-calon pemimpin republik. Partai politik semata menjadi alat meraih kekuasaan dan tidak menjadi sekolah kenegarawanan bagi para politisi. Alhasil, partai politik melanggengkan kekuasaan oligarki para patron dalam meraup suara rakyat. Akumulasi dari kekecewaan publik terhadap kinerja partai politik akhirnya melahirkan gerakan relawan politik.

³ <http://www.prismaindonesia.com/index.php/editorial/item/325-relawan-politik>, diakses 26 Desember 2014.

⁴ <http://theconversation.com/jokowis-supporters-are-starting-to-doubt-the-indonesian-obama-37843>, diakses 18 Maret 2015.

⁵ Lihat Zuly Qodir, Orde Kerakyatan untuk Kemandirian. *Harian Kompas*, 16 Agustus 2014.

Gerakan non-partisan seperti yang ditunjukkan oleh relawan politik telah mampu mendorong perubahan dari luar sistem politik formal, yang selama ini belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Kemunculan serpihan-serpihan gerakan sosial non-partisan yakni relawan politik—telah mampu menumbangkan oligarkis partai politik yang sekaligus membangun pelebagaan demokrasi partisipatoris. Dalam hal ini demokrasi partisipatoris diartikan sebagai demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik, baik langsung maupun tidak langsung, dimana rakyat dapat mengajukan usul, masukan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah (Fikri AF, 1999).

Bila demokrasi partisipatoris dapat terlembaga dengan baik, maka hal itu akan menjadi salah satu faktor kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer—yang mana model ini merupakan pencerminan dari aktivitas politik yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok terutama relawan politik diluar institusi-institusi resmi negara. Disini peran relawan politik diupayakan dapat mengontrol, mengawasi, meningkatkan serta memberikan masukan seputar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Sehingga, akan selaras dengan kehendak rakyat dalam penyelenggara kehidupan bernegara. Pendek kata, fenomena baru demokrasi Indonesia tersebut telah menandai perubahan rekonfigurasi relawan politik yang kemudian mengajak kita pada dua pertanyaan; Bagaimana peran relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014? Kemudian bagaimana implikasi relawan politik dalam proses pelebagaan demokrasi? Batasan dalam artikel ini hanya seputar peran dan implikasi relawan politik dalam upaya membangun model demokrasi berkarakter ekstra parlementer.

Peran Relawan Politik dalam Konstelasi Politik

Peran relawan politik⁶ dalam konstelasi politik Indonesia seolah telah menjadi pilar utama pelebagaan demokrasi. Dengan cara masing-masing, para relawan politik tidak jarang bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur, tetapi dapat bergerak sendiri untuk mendukung calon presiden pilihannya. Tanpa disadari relawan politik, telah mampu membangun pelebagaan budaya partisipatif—bahkan kemudian muncul istilah '*Museumkan Pilpres*'.⁷ Relawan politik dalam konteks dinamika politik Indonesia dapat dikategorikan sebagai *new social movement* yang dihuni oleh kelas menengah. Kehadiran *new social movement*, yang bersamaan dengan kehadiran politik media sosial dapat dilihat sebagai bagian *popular culture* yang menitikberatkan pada penokohan. Heryanto (2012), menilai jika budaya populer dalam lanskap sosial politik Indonesia merupakan arena pertentangan representasi dan rekognisi terhadap satu tokoh tertentu. Peran, figur dapat menjadi sebuah *biopolitic* publik berwatak konfliktual sekaligus menjadi afiliasitas publik.

Jika mengacu pada tulisan Lane (2008) dan Aspinal (2013 a, b) fenomena ini menunjukkan tengah terjadi peningkatan partisipasi gerakan sosial, meskipun pada realitasnya masih terbatas dan terfragmentasi. Hal senada juga dikemukakan Nina Eliasoph dalam buku *The*

⁶ Sekretaris Jenderal DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Utje Gustaaf Patty mengatakan relawan Joko Widodo sudah ada di seluruh provinsi serta di beberapa negara di dunia sekitar 31 negara di dunia, di antaranya, Taiwan, Inggris, Malaysia, Amerika, dan Jepang. Lihat, Tempo.co (2014). Relawan Jokowi ada di 31 Negara. (Online) (<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/078567626/Relawan-Jokowi-Ada-di-31-Negara>, diakses 24 Desember 2014).

⁷ Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) akhirnya melahirkan bahwa partisipasi politik rakyat adalah kegembiraan spontan yang bisa menjebol dan membangun rajutan solidaritas tanpa pamrih. Lihat, Al-Rahab, Amiruddin. (2014). *Museumkan Pilpres*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/kolom/2014/07/31/1523>, diakses 25 Desember 2014).

Politics of Volunteering (2013), relawan terbukti mampu meningkatkan partisipasi publik. Namun, menurut Samah dan Susanti (2014) tidak semua komunitas relawan politik memiliki visi dan misi yang sama. Berdasarkan aktivitas kegiatan, ada tiga kategori relawan politik yaitu; *Pertama*, relawan narsis adalah mereka yang sekedar mencari popularitas. Seperti membuat spanduk dukungan untuk Jokowi disertai foto dirinya sendiri. *Kedua*, relawan rente, yakni relawan yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap Jokowi, namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan semata. Para relawan ini biasanya menjadi *event organizer* dalam suatu acara dukungan dan mengedarkan proposal untuk pelaksanaan acara tersebut, yang tujuan akhirnya mendapatkan laba dari acara tersebut. *Ketiga*, relawan *fans club*, adalah mereka yang yang aktivitasnya hanya memuji-muji apapun yang dilakukan Jokowi dan marah-marah jika ada yang memojokkan Jokowi. Para relawan ini tidak akan segan-segan membela Jokowi jika dihina di media sosial. Biasanya jenis relawan politik ini berasal dari anak-anak muda dan artis.

Gejala peningkatan partisipasi publik semenjak kehadiran relawan politik dapat menandai skema baru meningkatnya partisipasi publik yang pada dasarnya merupakan bagian partisipasi pada umumnya. Charles Andrian dan James Smith (dalam Marijan, 2010) mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. *Pertama*, adalah partisipasi yang lebih pasif. Partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. *Kedua*, adalah partisipasi yang lebih aktif, yakni sejauh mana orang itu terlibat di organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*), seperti kelompok-kelompok keagamaan, olahraga, pencinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh.

Ketiga, adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes, seperti ikut menandatangani petisi, memboikot, dan berdemonstrasi. Di sistem demokrasi seperti yang dianut di Indonesia, partisipasi publik atau khalayak lebih dilihat ke sejauh mana publik turut serta dalam setiap pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pengaruh relawan politik dalam meningkatkan partisipasi rakyat dalam kontestasi presidensial 2014⁸—terlihat dari hadirnya para pegiat seni yang selama ini selalu menjadi pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Namun, pada saat itu para pegiat seni mau bahu-membahu untuk turun ke jalan. Hal ini seolah menggambarkan kedewasaan mereka dalam mengawal transisi demokrasi. Fenomena ini mengkonfirmasi pendapat Verba, Schlozman, dan Brady (1995: 1) yakni partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi. Artinya, dengan segala plus-minusnya, relawan politik mampu membangkitkan semangat demokrasi di negeri ini, yang sudah mulai mengarah kewujud inti dari demokrasi atau demokrasi ideal. Inilah dimensi riil demokrasi kerakyataan yang berproses dan bergerak dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya, yakni demokrasi elitis yang hanya dimonopoli oleh sebagian elite politik sebagai pelaku utama.⁹

Wujud partisipasi politik lain yang dilahirkan oleh relawan politik dimanifestasikan

⁸ Partisipasi pemilih terdaftar dalam memberikan suara untuk Pileg 2014 mengalami peningkatan dari 70,29 persen pada Pemilu 2009 menjadi 76,11 persen untuk Pemilu 2014. Peningkatan ini terjadi karena pengaruh para capres yang sudah melakukan kampanye lebih awal. Jumlah suara sah mengalami peningkatan dari 85,59 persen (jumlah suara tak sah 14,41 persen) pada Pileg 2009 menjadi 90 persen (jumlah suara tak sah 10 persen) untuk Pileg 2014. Meski cara nyoblos sudah menggantikan cara nyontreng, ternyata jumlah suara tak sah masih tinggi.

⁹ Meski yang terakhir ini kelompoknya kecil, meminjam bahasanya Gramsci (2009), mereka adalah pemenang wacana atas kuasa mayoritas. Sedangkan rakyat tetap menjadi mayoritas terpinggirkan yang bungkam dan dibisukan.

dalam bentuk sumbangan dan donasi pada rekening dana kampanye Jokowi-JK. Tujuan menggalang donasi tersebut tidak lain adalah berupaya melibatkan masyarakat secara langsung dalam kampanye Jokowi-JK. Melalui Rekening BRI kantor cabang Mall Ambassador dengan nomor rekening 1223 01000172309 atas nama Joko Widodo-Jusuf Kalla,¹⁰ diharapkan publik mampu ikut berpartisipasi dan bergotong royong menjadi pemacu agar Jokowi-JK dapat menjadi pemimpin sejati. Selain angka-angka cantik yang dipilih untuk menunjukkan dukungan, terdapat pula nilai nominal Rp 2.000 atau Rp 5.000. Padahal, bagi kebanyakan penduduk Jakarta, nilai tersebut hampir tidak memiliki nilai. Namun, setiap sumbangan yang diberikan, berapa pun nilainya, tetap dimaknai sebagai bentuk keinginan rakyat untuk terlibat dalam menentukan pilihannya.

Pengelolaan dana sumbangan kampanye ini dilakukan secara transparan dengan membuat website *www.jokowi-jk-kita.com* yang ditujukan untuk dapat selalu memberikan gambaran data perolehan sumbangan dari masyarakat. Tercatat sumbangan dana kampanye mencapai Rp 312.376.119.823. Rinciannya, dana terpakai Rp 311.899.377.825. Sumbangan dari partai pendukung Rp 206.531.657.775, Sedangkan yang berasal dari masyarakat mencapai Rp 105.844.462.048, terdiri dari dua sumber yakni perusahaan dan perorangan. Dari perusahaan Rp 63,1 miliar dan perorangan Rp 42.744.462.048. Uniknya, dari perorangan berasal dari 60.000 orang — dan terdapat 59.000 penyumbang yang memberikan sumbangan dibawah Rp 100.000 (Qodir, 2014).

Menariknya, para relawan politik bergerak dengan mengedepankan cara-cara kreatif melalui kerja-kerja teritorial yang memang belum tertata dengan baik. Para relawan

politik ini juga menampilkan model kampanye kreatif¹¹ yakni kampanye yang mengedepankan aspek seni rupa maupun grafis, sehingga dapat menjadi daya tarik di tengah kejenuhan publik menyaksikan model kampanye konservatif selama ini. Melalui kampanye kreatif yang banyak mengandung unsur gagasan dan hiburan diharapkan dapat lebih menarik partisipasi publik yang lebih luas.

Selain itu, meningkatnya partisipasi publik juga dipengaruhi oleh peran media sosial yang mampu mengkomunikasikan program-program tersebut di tingkat rakyat. Dalam konteks ini relawan politik biasanya bergerak melalui dua strategi yakni secara *offline* dan *online*.¹² Alhasil, perpaduan dua gerakan yang melibatkan kelas menengah, mampu membangun fungsi *linkage* antara rakyat dan pemimpin (Utomo, 2013). Apalagi, *netizen* dan dunia nyata bukanlah dua dunia yang terpisah. Interaksi keduanya bersifat komplementer, sehingga membuat peran media sosial tidak dapat menggantikan peran dunia nyata. Namun, interaksi dan komunikasi digital dapat berkembang sekaligus menjadi pertimbangan (*deliberasi*) publik (Priyono, 2014: 166). Artinya, relawan politik terlahir berkat sokongan media sosial yang berperan besar mendorong dalam dunia nyata. Mulai dari membangun diskursus seputar dinamika politik, hingga berkembang menjadi berbagai aksi nyata dan jalanan baik disemua lini baik tingkat lokal maupun nasional.

¹¹ Memang harus diakui, dalam literatur ilmu politik, istilah kampanye kreatif masih terasa asing karena jenis kampanye yang kita kenal selama ini ada tiga; kampanye positif, kampanye negatif, dan kampanye hitam.

¹² Kita dapat mengenal relawan dunia nyata (*offline*) dan relawan dunia maya (*online*). Di mana tujuan penggunaan media sosial oleh para *netizen* adalah untuk membicarakan persoalan publik yang lebih luas, kemudian pekerjaan/organisasi baru persoalan komunitas dan urusan pribadi. Prosentasi pemanfaatan media sosial untuk kepentingan publik rata-rata 76-100%. Lihat, Priyono, dkk. (2014) Media Sosial Alat Gerakan Sipil; belajar dari kesuksesan Jakarta dan Masa depan Indonesia. hlm 146.

¹⁰ Lihat, Tempo.co. Isi Rekening Donasi Jokowi-JK Baru Rp 152 Juta. (Online). (<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/29/269580990/Isi-Rekening-Donasi-Jokowi-JK-Baru-Rp-152-Juta>. diakses 2 Januari 2014)

Keberadaan media sosial, berperan penting dalam mendorong *demos* untuk mewujudkan sebuah kesetaraan, partisipasi, serta *voluntarisme*. Mafhum disadari jika pertarungan di dunia maya tidak terhindarkan—aksi saling *bully* maupun perang posting di jejaring sosial, seperti *facebook*, *twitter*, dan *youtube*, tidak terhindarkan. Apa yang diutarakan Gramsci sebagai *war of position*, sebagai gelanggang pertarungan untuk memenangkan hegemoni menjadi kenyataan. Ketegangan kreatif dalam dunia maya telah meminimalisir terjadinya potensi konflik terbuka. Bahkan, ia telah mengubah materi kampanye politik yang biasanya klise menjadi sangat kreatif. Bahkan, ada pula kelompok relawan politik yang menamakan “Generasi Optimis” yang sukarela meluncurkan film dokumenter animasi, *game*, gambar plesetan yang kocak, musik hingga *online shop* yang menjual berbagai pernik-pernik seputar Jokowi-JK.

Inilah esensi dari peran relawan politik dalam konstelasi politik yang dapat dianalogikan sebagai kemunculan suara rakyat sebagai suara Tuhan. Hasilnya dapat dilihat, meskipun Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk dan kondisi geografis yang terpisah-pisah, tetapi kampanye kreatif yang digerakkan oleh relawan politik—mampu melahirkan kegembiraan politik atau yang lebih dikenal dengan istilah demokreatif (Prast, dkk, 2014). Efektivitas gerakan relawan politik juga telah diukur oleh berbagai lembaga survei. Bahkan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)¹³ menunjukkan jumlah mesin partai yang bergerak dalam setiap pemilu hanya berkisar 9

persen, sisanya digerakkan oleh aktor lain seperti relawan politik. Hal itu mengkonfirmasi bahwa mesin partai sudah tidak efektif lagi dalam memuluskan pasangan capres-cawapres. Pasalnya, mesin partai sulit bergerak untuk menembus langsung pada pemilih, karena sekat-sekat ideologis atau buruknya citra elit parpol atau politisi, sehingga sulit menyapa pemilih secara langsung atau bahkan merebut hati pemilih. Sedangkan relawan politik lebih luas jangkauan segmentasi pemilih, sebab tidak terikat oleh jejaring partai politik. Apalagi, bagi pemilih pemula yang belum memahami ideologi partai politik, atau belum memahami politik secara komprehensif terutama mengenai figur politik dan capres—dapat dengan mudah berdialog pada relawan politik ketimbang kader maupun simpatisan partai politik.

Kehadiran relawan politik pada akhirnya menciptakan tradisi baru perpolitikan Indonesia yakni tradisi voluntaristik. Kehadiran gerakan sosial non-partisan ini terbukti dapat mengacaukan ekuilibrium politik yang selama ini dikuasai konsensus konservatif. Bahkan, pencapresan sosok Jokowi tidak terlepas dari campur tangan kelompok ini, yang otomatis mengacaukan konsensus konservatif “Batu Tulis” antara elit PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra. Partisipasi publik ini juga berimplikasi positif pada upaya publik untuk lebih aktif memberikan usulan model pemimpin pilihan rakyat.¹⁴ Salah satunya model kepemimpinan transformatif yang mau mendengar suara rakyat dan mau berada di tengah-tengah rakyat. Kerja-kerja kreatif para relawan politik telah mengubah peta kekuatan capres secara drastis, apalagi, pemilih kita lebih didominasi oleh pemilih yang dikategorikan *undecided voters*.¹⁵

¹³ Relawan Jokowi mengklaim ada sekitar 112 kelompok relawan terdaftar dengan kami, sedangkan dikubu kandidat saingan Prabowo Subianto, jumlah kelompok relawan mencapai 250. Sebagian besar kelompok relawan mewakili komunitas tertentu, mulai dari pedagang kaki lima, sopir bus, ibu rumah tangga dan mahasiswa, akademisi, pengusaha dan aparat militer dan polisi pensiun. Beberapa bahkan terbentuk di luar negeri. (Online), (<http://www.tempokini.com/2014/06/relawan-kunci-kemenangan-capres>, diakses 24 desember 2014)

¹⁴ Arianto, Bambang. 6 Agustus 2014. Epilog Kontestasi Presidensial 2014. *Media Indonesia*, hlm 24.

¹⁵ *Undecided voters* merupakan pemilih yang belum menentukan pilihan. Tipologi pemilih yang tidak memiliki kecenderungan untuk tetap ajeg memilih kandidat politik. Hal ini menjadi alasan mengapa pembentukan preferensi politik elektoral di Indonesia

Norquay (2008) menyebut kehadiran relawan politik sebagai fenomena pengorganisasian tanpa organisasi (OTB) lahir sebagai akibat kembalinya politik identitas.¹⁶ Masifnya kampanye hitam yang menggunakan isu primordialisme (SARA) akhirnya menyulut aksi relawan politik untuk semakin berjuang. Bahkan, menurut Kartika Djoemadi¹⁷ koordinator *Jokowi Advanced Social Media Volunteers* (Jasmev), menilai relawan politik yang beroperasi di darat rela dan ikhlas untuk meluncurkan tabloid tandingan bernama *Tabloid Rahmatan Lil'Alamin*, *Jokowi JK adalah kita*, guna menangkai kehadiran *Tabloid Obor Rakyat*.¹⁸ Fenomena relawan politik merupakan episode awal dari efek kemunculan esensi demokrasi yang menyerupai kelompok penekan¹⁹ pada era-1998-an. Hal ini dapat dilihat dari kontur saat berlangsung kontestasi presidensial 2014 lalu, beragam modalitas sosial, seperti komunitas *sepeda onthel*, komunitas layang-layang, pedagang pasar, berubah jadi modalitas politik dalam barisan relawan politik. Para relawan politik lahir secara spontan, mendeklarasikan²⁰ dukungan secara terbuka,

bekerja tersebar, dan bersifat desentralis saat memasuki wilayah-wilayah geografi pemilih. Akhirnya, kolektivitas dalam bentuk *power to* dan *power with* ini telah melahirkan semacam ledakan kegembiraan dan kreativitas politik yang sangat luar biasa.

Mengutip pernyataan Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN), partisipasi warga negara Indonesia di luar negeri yang mengikuti proses pemungutan suara Pilpres 2014 meningkat 83 persen²¹ ketimbang pada tahun 2009 (*The Jakarta Post*, 2014). Bahkan, di sejumlah PPLN terjadi peningkatan hingga mencapai 800 persen seperti yang terjadi di Addis Ababa (Ethiopia). Akhirnya, tradisi *volunterisme* itu tidak lain merupakan upaya derivatif melahirkan demokrasi yang terikat kuat pada kewarganegaraan (*citizenship*). Jejaring relawan politik adalah perwujudan awal dari semangat kewarganegaraan yang tumbuh secara kolektif dan bergerak bersama-sama dalam sifat yang politis.

Relawan Politik dan Proses Pelembagaan Demokrasi

Kunci kemenangan pasangan Jokowi-JK adalah bersumber dari masifnya dukungan politik massa atau rakyat yang bermukim di ruang publik politik yang sedang terbentuk (*cyber-civiv space*) serta subjek-subjek politik baru termasuk Internet. Menurut Merlyna Lim

sangatlah artifisial dan dibentuk secara instan. Itu pertanda faktor elektabilitas capres bukanlah satu-satunya modal dalam pilpres 2014.

¹⁶ Hanif, Hasrul. (2007). Antagonisme Sosial, Diskonsensus dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11 No. 1 Edisi Juli.

¹⁷ Kartika Djoemadi, merupakan Koordinator *Jokowi Advanced Social Media Volunteers* (Jasmev) Lihat Wawancara Majalah Tempo (2014) dengan Kartika Djoemadi, pimpinan Jasmev. Edisi 15-21 Desember 2014, hlm 77.

¹⁸ UU No 49 Tahun 1999 tentang Pers dan Dewan Pers ialah semata-mata untuk meluruskan fungsi mulia media. Atas dasar itulah Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan menyatakan tabloid Obor Rakyat tidak dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik, bukan hanya karena tidak memiliki surat izin jurnalistik, melainkan juga karena isinya jauh dari asas-asas jurnalistik yang baik (*Kompas*, 17 Juni 2014).

¹⁹ Kelompok penekan ini hampir menyerupai gerakan 1998 yang mana saat itu terjadi pembangkangan para elit dan intelektual terhadap rezim Soeharto (Uhlir, 1998).

²⁰ Pada Pilpres 2014 inilah terjadi peningkatan antusiasme

warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilih baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat dilihat banyaknya dukungan buat Jokowi-JK dari publik. Seperti, sejumlah pelajar dan masyarakat Indonesia berkumpul di kampus Universitas Harvard di Cambridge, Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (14/6) untuk menyatakan dukungan mereka kepada Jokowi-JK. Dukungan ini dinyatakan di depan Patung John Harvard di Universitas Harvard. Lihat, <http://sp.beritasatu.com/home/mahasiswa-indonesia-deklarasikan-dukungan-jokowi-jk-di-kampus-harvard/57534>, diakses 2 Januari 2014.

²¹ *Overseas voter turnout up by 83%, says PPLN*. (Online). (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/17/overseas-voter-turnout-83-says-ppln.html>), diakses 2 Januari 2014)

(2014), ada tiga konsep yang bermanfaat untuk mengeksplorasi internet sebagai teknologi yang dapat diterima dan ditransformasikan di dalam proses perubahan sosial pada konteks lokal, yakni masyarakat sipil, ruang publik dan identitas.²² Relawan politik juga terlahir dari subyek-subyek yang tidak teroganisir. Seperti tidak terikat pada struktur vertikal bersifat sukarela, bekerja partisipatif, mewakili fenomena personal-politik—serta didukung morfologi yang sangat tergantung pada jejaring non-formal. Dukungan yang diperoleh berasal dari politik jalanan yang kemudian mengkristal menjadi gerakan non-partisan.

Pada titik inilah relawan politik telah dapat melakukan pelembagaan demokrasi karena adanya pertemuan kelas menengah perkotaan dan dunia maya yang merupakan pertanda penting tengah terjadi politisasi ruang-publik. Fenomena tersebut agaknya berpotensi membentuk arus balik kedua bersifat antagonistik terhadap struktur hegemonik politik *mainstream* berbasis oligarki dan patronase. Dalam kecenderungan itu, kita sedang menyaksikan proses politik demokrasi baru bukan kearah konsensus dan kompromi elite, tetapi arah disensus dan antagonisme. Setelah sekian lama ditelikung oleh kontur dan logika liberal guna memenangkan nalar politik konsensus konservatif. Sejatinya, inilah

tahap awal bagi politik demokratisasi yang sedang bergeser, yakni pembentukan saluran partisipatoris baru yang diharapkan menjadi aspek penting yang akan menjadi suplemen demokrasi.

Hal ini akan mengkonfirmasi bahwa relawan politik terlahir dari kejenuhan, atas mengguritanya praktik-praktik klientelistik (jasa yang dipertukarkan) atau yang dikenal patronase. Defisit demokrasi kerap membuat rakyat kerap diperdaya oleh kepentingan para oligarkis. Namun dengan kehadiran relawan politik telah membuktikan jika kedaulatan rakyat tidak bisa dibeli oleh politik uang (*money politic*).²³ Bahkan, relawan politik sebagai saluran partisipatoris baru ini telah mampu menghambat peredaran politik uang. Apalagi, selama ini banyak penilaian bahwa suara pemilih khususnya kelas miskin dapat digadaikan dengan imbalan uang, sembako ataupun material lainnya (Choi, 2009; Hidayat, 2009; Taylor, 1996) yang mana pola-pola relasi seperti ini sangat kuat berakar di dalam identitas lokal Indonesia. Inilah kenyataan dinamika politik Indonesia, sebuah demokrasi, yang telah gagal melenyapkan kesenjangan sosial yang relasinya ditandai oleh kegiatan *rent-seeking* dan berpotensi menimbulkan kekerasan. Gerry Van Klinken menyebut hal ini sebagai gejala demokrasi patronase (Klinken, 2014 : 225). Dimana gerakan demokratisasi yang berlangsung selama ini lebih dicurahkan pada upaya menghadirkan lembaga demokrasi,

²² *Pertama*, masyarakat sipil dimaknai sebagai pendekatan-pendekatan baru yang lebih melihat masyarakat sipil di antara kepentingan Negara dan kepentingan dunia (bisnis) ekonomi (Fine, R dalam Lim 2014). *Kedua*, ruang publik yang dalam konteks ini mengungkapkan ada empat unsur yang membentuk ruang publik, yakni pers (media), obrolan (*conversations*), pembentukan opini publik, dan tindakan (Kim, J dalam Lim, 2014). Hal ini menegaskan jika salah satu dari pilar dari ruang publik yang efektif adalah media massa dan teknologi media, yang dapat menjadi alat untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan individu yang dapat menjadi oposisi efektif terhadap kekuasaan Negara. *Ketiga*, identitas sebagai sumber-sumber kekuasaan dan perlawanan. Dalam konteks ini kendati identitas terdiri dari banyak lapisan, dan seringkali bertentangan satu sama lain, ia tetap melahirkan suatu identifikasi simbolik yang mengaitkan seseorang atau sekelompok orang dengan tindakan-tindakannya.

²³ Politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah, atau barang ke pada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama*, politik uang yang secara spesifik menunjuk pada strategi ritel jual beli suara (*vote buying*). Dari segi waktu biasanya dilakukan menjelang pemilu (serangan fajar). Kadang dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, tapi ada pula yang sesudahnya setelah terbukti dukungan cukup signifikan. *Kedua*, strategi politik uang grosiran dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana *pork barrel* untuk kepentingan elektoral.

baik pada ranah negara maupun rakyat—bukan berupaya meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi dan membangun perilaku demokrasi di kalangan para penyelenggara negara, politisi, serta masyarakat sipil sebagai modal sosial cenderung terabaikan.

Fenomena relawan politik telah menjadi penanda kelahiran berbagai aktor demokrasi yang mampu meruntuhkan model politik Indonesia yang berbasis patronase.²⁴ Hal ini mengkonfirmasi hasil temuan dari penelitian lanjutan²⁵ yang digelar oleh *Power, Welfare and Democracy* (PWD) Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian ini dikenal beberapa indikator pelebagaan demokrasi. *Pertama*, menguatnya institusi masyarakat sipil dan melemahnya institusi tata pemerintahan demokratis terhadap praktek tigabelas (13) jenis institusi demokrasi.²⁶ *Kedua*, menguatnya

politik berbasis individual sebagai aktor demokrasi. Dari temuan ini ada kecenderungan bahwa politik saat ini berbasis pada individual atau *figure-based politics*. *Ketiga*, adanya relasi antara aktor dan institusi demokrasi. Hasil survei PWD ini menunjukkan bahwa para aktor utama, baik aktor dominan maupun aktor alternatif cenderung mempromosikan demokrasi daripada menyalahgunakannya. *Keempat*, keinginan publik untuk terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*)—yang mampu mengurus pelayanan dasar warga-negara.

Survei tersebut menegaskan terjadinya perbaikan iklim demokrasi setelah sekian lama kekecewaan publik meluas—terhadap pola-pola praktik oligarki-partokratik, di mana mekanisme politik elektoral hanya memproduksi relasi-relasi kuasa lama. Pada akhirnya, relawan politik sebagai saluran partisipatoris baru telah menandai arus-balik politik yang penting dalam proses demokratisasi—sekaligus penanda awal *civic engagement* bagi tampilnya figur yang sama sekali berbeda. Itulah arus-balik pertama politik demokratisasi dalam konteks Indonesia. Namun, kita perlu menguji kedepan apakah saluran partisipatoris ini mampu mengawal pemerintahan Jokowi agar tetap mampu menjanjikan kepemimpinan transformatif bagi trayektori baru demokrasi partisipatoris. Namun, perlu digarisbawahi bahwa trayektori demokrasi partisipatoris dapat saja terlahir bila budaya politik partisipatif dapat tumbuh dengan dinamis—meskipun cengkraman patronase politik masih tetap mendominasi.

Keberhasilan relawan politik mengantarkan Jokowi-JK menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh sebagai awal dari perjuangan para relawan dalam upaya pelebagaan demokrasi partisipatoris. Menurut peneliti LIPI Siti Zuhro, gejala tersebut telah mengintroduksi eksperimen

dan mengimplementasinya.

²⁴ Lihat, Klinken, Gerry Van. (2014: 236). Demokrasi Patronase adalah istilah yang baru belkangan digunakan oleh Kanchan Chandra dalam studinya mengenai politik pasca kemerdekaan di India. Dia mendefinisikan demokrasi patronase sebagai demokrasi, dimana Negara memiliki monopoli relatif atas pekerjaan dan jasa dan di mana para pejabat terpilih menikmati diskresi (ruang gerak) signifikan dalam pelaksanaan hukum untuk mengalokasikan pekerjaan dan jasa-jasa itu sebagian pemberian negara.

²⁵ Penelitian sebelumnya dilaksanakan oleh lembaga *Demos* yang menarik kesimpulan tengah terjadi defisit demokrasi.

²⁶ Ketigabelas jenis institusi demokrasi ini meliputi. 1) yang terkait dengan kewarganegaraan (*citizenship*) yakni terdiri dari kewarganegaraan yang setara (*equal citizenship*), aturan main (*rule of law*), keadilan yang setara (*equal justice*), dan hak asasi manusia universal (*universal human right*). 2) seperangkat aturan main yang terkait dengan keterwakilan (*representation*). Kelompok ini terdiri dari perwakilan politik yang demokratis (*democratic political representation*), partisipasi warganegara (*citizen participation*), adanya saluran kepentingan berbasis kepentingan dan isu yang terlebaga (*institutionalized channels for interest—and issu based representation*), demokrasi lokal (*local democracy*) dan kontrol penggunaan instrumen kekerasan yang demokratis (*democratic control of instrumens of coercion*). 3) seperangkat aturan main yang terkait dengan tata pemerintahan yang demokratis. Di sini, kelompok ini terdiri dari tata pemerintahan yang transparan, akuntabel dan imparial, serta kemandirian pemerintah dalam membuat keputusan

demokrasi partisipatoris. Dalam konteks ini demokrasi partisipatoris dapat menjadi alternatif terhadap demokrasi liberal elektoral yang gagal memberi ruang bagi partisipasi publik. Demokrasi partisipatoris menjanjikan partisipasi publik yang lebih luas di luar Pemilu, karena basisnya adalah kepedulian atas persoalan publik. Demokrasi partisipatoris menjadi antitesis terhadap demokrasi berbasis partai yang hanya berkepentingan membeli suara rakyat lima tahun sekali. Kekuasaan elitis inilah yang kemudian dianggap menjadi penyebab termarginalisasi kekuatan-kekuatan sosial non-partai dari arus utama dinamika politik, karena minimnya medium interaksi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh aktor sosial yang membangun relasi-relasi yang melahirkan elemen penyusunan tatanan (struktur) dan memberikan makna kepada sekelompok dunia konektifnya sendiri (Singh, 2010).

Mengutip, Ignas Kleden (2014) sebagai gerakan politik, tujuan dan tugas relawan politik telah tercapai. Relawan politik telah mampu memenangkan pasangan Jokowi-JK sekaligus menegaskan *social movement* dapat menciptakan suasana politik dan kebudayaan yang lebih baru. Tetapi, sebagai gerakan sosial, pekerjaan para relawan politik baru dimulai dan sejarah akan mencatat, apakah cita-cita suatu masyarakat baru dapat terwujud setelah pragmatisme politik dan semua turunannya dapat digeser oleh budaya *voluntaristik* dalam langgam politik dan kebudayaan Indonesia. *Volunterisme* ini dapat membuktikan apakah kebekuan politik dan sempitnya ruang gerak kebudayaan yang selama ini — dapat diterobos oleh suatu kebersamaan baru dalam ruang publik.

Salah satu pilar kekuatan dan kesuksesan tim sukses Jokowi-JK lebih disebabkan peran relawan politik dapat menembus massa akar rumput dengan mudah. Pasalnya, relawan politik memiliki kesempatan berdialog lebih leluasa dari pintu ke pintu (*door to door*) untuk merebut hati calon pemilih. Itulah mengapa,

relawan politik yang terlahir dapat bergerak secara sukarela, egaliter, tidak elitis dan bahkan lebih militan. Dengan jumlah relawan yang menyebar dan menguasai di berbagai wilayah hingga ke tingkat bawah dapat dengan mudah meyakinkan kandidat atau figur yang mereka dukung.

Selain itu, peningkatan fenomena kerelawanan sudah mulai tampak hadir ketika Jokowi-JK akan menyusun kabinet pemerintahan—para relawan politik Jokowi yang tergabung dalam *Jokowi Center* dan *Radio Jokowi*, mencoba ritual baru, dengan mengajak publik untuk sama-sama memberikan usulan nama para menteri yang pantas mengisi kabinet kerja Jokowi-JK. Para relawan politik bahkan memberi tiga pilihan nama dari setiap pos menteri untuk dipilih dan hasil *polling* tersebut diunggah di situs *www.jokowicenter.com* dan disebarluaskan melalui media massa dan media sosial.²⁷ Langkah taktis dan cerdas²⁸ ini ditujukan untuk menghindari pola-pola transaksional dan politik dagang sapi. Sebab, selama ini ritual bagi-bagi kursi menteri antara partai koalisi kerap membuat keraguan publik akan hadirnya para menteri ahli/profesional atau lebih dikenal *zaken kabinet*.²⁹

²⁷ <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595486/Susun-Kabinet-Jokowi-Minta-Masukan-Rakyat-via-Facebook>, diakses 25 Desember 2014.

²⁸ Banyak pihak menilai langkah taktis Jokowi membentuk kabinet usulan rakyat adalah ide cerdas dalam upaya membangun demokrasi partisipatoris. Lihat, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/25/jokowi-goes-online-cabinet.html>, diakses 25 Desember 2014.

²⁹ Namun, dalam historiografi ketatanegaraan Indonesia, *zaken kabinet* (kabinet ahli) bisa berjalan efektif hanya terjadi dalam hasil Pemilu 1972, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Kala itu, perolehan suara Golongan Karya (Golkar) di atas 70 persen pada rezim Presiden Soeharto, sehingga Presiden Soeharto bisa membentuk *zaken kabinet*. *Zaken kabinet* hasil Pemilu 1997 juga akhirnya tumbang satu tahun kemudian, yakni pada 21 Mei 1998, setelah Presiden Soeharto dipaksa mundur dari kursi presiden. Sedangkan *zaken kabinet* yang pernah dibentuk di era pemerintahan Presiden Sukarno (Kabinet Djuanda, 1957) juga mengalami nasib tragis akibat situasi politik di dalam negeri yang terus bergolak akibat terjadinya pemberontakan dan isu

Meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, beredarnya usulan nama menteri melalui *polling* menteri untuk 34 posisi yang diberi nama *Kabinet Alternatif Usulan Rakyat* (KAUR)—menjadi penanda penting peningkatan gairah partisipasi publik. Usulan kabinet versi rakyat diharapkan mampu mengajak rakyat untuk memiliki kesempatan yang panjang dalam menilai aspek kepantasan calon menteri, baik dari sisi soal integritas, moralitas, dan kapabilitas. Hal ini sebagai upaya membangun kontrak sosial yang akan mendasari praktik *volunterisme* rakyat dengan menyerahkan kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing individu (Hanif, 2007). Kedepan, dalam konteks ke-Indonesia-an, partisipasi publik yang hadir melalui saluran partisipatoris baru diharapkan tidak hanya berhenti pada ramai-ramai memilih dalam kontestasi elektoral maupun presidensial saja.

Model Demokrasi Berkarakter Ekstra Parleментар

Jika melihat peran dan implikasi dari keberadaan relawan politik, dapat disimpulkan bila relawan politik dapat menjadi salah satu pilar demokrasi. Artinya, relawan politik dapat berperan sebagai pengawas dan pengimbang terhadap kekuasaan negara atau yang lebih dikenal dengan model demokrasi berkarakter ekstra parlementer. Hal itu disebabkan karena di negara yang sudah mapan dan paling demokratis sekalipun tidak ada suatu jaminan bahwa trias politika mengenai pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dapat berjalan dengan baik dan ideal.

Alhasil, untuk membangun demokrasi berkarakter ekstra parlementer perlu adanya pilar kelima dari pelebagaan demokrasi yakni relawan politik. Selama ini kita hanya mengenal pilar demokrasi terdiri dari partai politik,

mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas). Harapannya relawan politik dapat menjadi respons terhadap ketidakadilan sosial dan otoritarianisme negara. Artinya, relawan politik dapat menjadi tulang punggung gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya membangun model demokrasi berkarakter ekstra parlementer ada beberapa hal yang perlu dibangun oleh para relawan politik, diantaranya. *Pertama*, relawan politik diharapkan menawarkan wacana pemikiran alternatif di tingkat ideologi sebagai jalan lain atau tandingan bagi konsep kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan. *Kedua*, relawan politik dituntut bukan sekadar hanya mampu berwacana, melainkan juga memberikan contoh nyata mengenai penerapan di lapangan. Hal itu dapat terlihat sesaat Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reaksi dan respon publik yang dimotori relawan politik begitu menarik perhatian—baik melalui aksi jalanan maupun di media sosial. Protes publik atas pencalonan Kepala Polri (Kapolri) tersebut, sebagai pertanda bila peran relawan politik telah mampu menyandingkan wacana publik dengan pemerintah—sekaligus alat kontrol tentang apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah.

Bahkan, ketika terjadi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Para relawan politik bersama-sama dengan publik melalui media sosial dengan cepat menggalang dukungan dengan menampilkan tagar #SaveKPK. Tagar ini menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia di sejumlah akun *Facebook* dan *Twitter* untuk memberikan dukungan kepada KPK. Hal itu menegaskan bahwa respon dan partisipasi aktif terlahir bukan hanya disebabkan oleh sosok Presiden Joko Widodo semata. Namun, lebih kepada dinamika politik media sosial yang bergerak dinamis dalam upaya mewujudkan politik bersih.

perebutan Irian Barat. Lihat, Bambang Arianto. (2014). *Impian Zaken Kabinet*. Koran tempo, 28 April 2014.

Ketiga, relawan politik diharapkan mampu menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi publik terutama seputar kebijakan pemerintahan. Informasi ini sejatinya mampu menjadi suplemen bagi pemberdayaan, pendidikan politik melalui jejaring diskusi secara reguler—baik yang dimulai dari kota sampai ke komunitas-komunitas basis di desa. Kondisi ini menciptakan suasana dan mendorong orang saling berdiskusi dan melahirkan partisipasi aktif. *Keempat*, relawan politik dapat memainkan peran sebagai pemimpin perubahan. Hal itu disebabkan karena para relawan politik dapat bergerak bebas dan tidak terikat oleh partai politik tertentu. Bahkan, para relawan politik dapat dengan mudah untuk membubarkan diri.

Kedepan, permasalahan serius yang dihadapi para relawan politik adalah membangun kesamaan visi dan misi dalam mengawal pemerintahan. Ancaman dan wacana akan terjadinya perpecahan, serta perbedaan penekanan pada kerja-kerja berdasarkan isu tunggal seringkali terjadi. Hal itu dikarenakan banyak ditemukan simpul para relawan yang memiliki agenda masing-masing. Terjadinya defisit demokrasi yang diakibatkan merebaknya korupsi-suap sejatinya dapat menjadi salah satu tugas utama relawan politik—untuk bertanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal itu dapat terwujud jika diantara kelompok relawan politik sering melakukan langkah-langkah konsolidasi, di antaranya membangun agenda bersama yang didasarkan pada hasil kajian dan riset, mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari luar, membangun sistem informasi dan pangkalan data yang menjadi bahan belajar masyarakat dan pelaku gerakan baru guna terus membangun tradisi kerelawanan baru.

Deskripsi tersebut akan menjadi fase awal dalam membangun model demokrasi berkarakter ekstra parlementer yang dalam konteks ini dapat dilihat sebagai aktivitas

politik yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok diluar institusi-institusi tersebut. Langkah taktis tersebut diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal diantaranya; (1) mempengaruhi (*influencing*) proses pelaksanaan kebijakan publik. (2) mengawasi (*monitoring*) proses pelaksanaan kebijakan publik. (3) memberikan penilaian (*evaluating*) pelaksanaan kebijakan publik, dan (4) memberikan bantuan dan pembelaan (*advocacy*) terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan publik.

Oleh sebab itu, untuk menciptakan pengetahuan dalam upaya membangun karakter ekstra parlementer para relawan politik dapat meneliti sebab-akibat dari kinerja kebijakan dan program publik. Terutama, soal apakah suatu kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang atau hanya diputuskan sepihak untuk memenuhi berdasarkan kepentingan politik semata. Beberapa langkah taktis dalam mengolah kebijakan dalam konteks ekstra parlementer, diantaranya, *Pertama*, melihat sejauh mana suatu kebijakan publik dalam kaitannya dengan pendapat umum. Apakah publik menerima atau justru menentang kebijakan tersebut. *Kedua*, para relawan politik dapat mengembangkan debat publik sebagai suatu tawaran untuk memberikan alternatif pemecahan solusi dari berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

Singkat kata, semua langkah taktis itu ditujukan untuk melakukan apa yang disebut sebagai model pengawasan dan kontrol terhadap suatu bentuk kebijakan dalam model ekstra parlementer. Sebab, model ini akan dapat terlembaga dengan baik bila memenuhi proses monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan publik yang diputuskan oleh Presiden Jokowi. Termasuk menganalisa kebijakan publik yang telah ditetapkan, serta mengawal berbagai aspirasi publik yang selama ini tidak mampu disalurkan oleh pilar demokrasi lainnya. Akhirnya,

fenomena relawan politik diharapkan mampu mewujudkan model demokrasi berkarakter ekstra parlementer yang dapat menjadi salah satu alternatif terbaik dalam konteks ke-Indonesia-an.

Kesimpulan

Meskipun, relawan politik sebagian besar berasal dari kelas menengah urban yang kritis terhadap politik. Namun, telah mampu membuat jejaring yang kuat, hingga akar rumput di berbagai kota dan desa, dengan sosok Jokowi sebagai faktor pengikatnya. Hal itu diperkuat oleh sosok Jokowi yang telah mampu melawan tatanan lama—sekaligus menjadi representasi dari demokrasi substantif yang mau mendengarkan suara rakyat ketimbang hanya di dengar. Fenomena relawan politik dalam kontestasi presidensial 2014 dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuansa patrimonial, oligarkis menuju *volunterisme* dan partisipatoris.

Hal itu dibenarkan oleh Zuly Qodir (2014), bahwa gejala *voluntary and people politics* didorong oleh dua hal, yakni gaya calon presiden dan wakil presiden yang menonjolkan hubungan humanis dengan rakyat yang akan dipimpinnya. Dimana, pemilihan lokasi dan simbol kampanye lebih menunjukkan bahwa sang kandidat mengedepankan masalah kerakyatan dengan cara turun ke bawah. Dengan gaya *blusukan* para pemilih menilai hal ini sebagai metode baru yang mampu membangkitkan simpati publik—bahwa calon pemimpin ini dipercaya mampu memecahkan masalah keseharian yang mereka hadapi ketimbang metode yang digunakan selama ini, sangat elitis dan birokratis. Sehingga, ada antusiasme besar dari publik bahwa langkah politik kubu oligarki dalam kontestasi presidensial 2014—dapat direspon secara kreatif oleh aksi kolektif relawan politik termasuk melakukan pengawalan suara dengan baik.

Kedepan relawan politik tetap memerlukan revitalisasi sebagai upaya penguatan nalar politik—guna menjaga aura pemerintahan Jokowi-JK agar tetap populis dan partisipatoris. Namun, konsep saluran partisipatoris baru yang dibangun hendaknya melibatkan rakyat secara keseluruhan. Untuk lebih mendekatkan pemerintahan Jokowi-JK kepada rakyat dalam bentuk aksi nyata diperlukan adanya internalisasi gagasan revolusi mental. Hal ini untuk menegaskan posisi relawan tidak saja berperan sebagai pengembira, tetapi juga mampu menjadi pengawas pemerintahan Jokowi-JK secara komprehensif. Sebab, ketatnya proses politik praktis, akan dapat membuat ruang gerak relawan politik dapat terkooptasi pada sosok Jokowi-JK yang berimplikasi pada melemahnya gerakan relawan politik.

Jika hal itu terjadi, maka dipastikan relawan politik akan sulit bersanding dengan mekanisme *blusukan* Jokowi dalam menyerap aspirasi dari bawah. Revitalisasi gerakan ini dengan membangun saluran partisipatoris deliberatif melalui pembentukan forum, baik institusional maupun kolateral. Hal ini bukan ditujukan agar para relawan politik dapat terlembagakan secara struktural atau bahkan berevolusi menjadi sebuah organisasi partai politik. Namun, revitalisasi ini berupaya melembagakan ideologi kerelawanan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Sebab, keberadaan relawan politik tidak sama dengan organisasi formal seperti partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan atau penekan yang lebih terorganisasi lainnya.

Selama ini gerakan sosial secara perlahan dapat berubah menjadi organisasi formal, sementara itu sangat jarang suatu organisasi formal berubah menjadi gerakan sosial. Penguatan relawan politik dalam bentuk forum partisipatoris non-formal menjadi alternatif terbaik dalam upaya menjaga marwah pemerintahan Jokowi yang populis. Jika fungsi ini dapat berjalan secara simultan maka posisi relawan dapat menjadi bagian dari gerakan kewargaan yang kritis, rasional sekaligus

suplemen demokrasi guna memperluas keterlibatan warga (*civic engagement*). Publik sangat membutuhkan relawan politik yang terlembaga dengan baik terutama dapat tetap proaktif, kreatif dan mampu mendefinisikan peran yang mereka mainkan—sekaligus mentransformasikan gerakan revolusi mental. Peran ini termasuk bagaimana bergerak, berinisiatif, memobilisasi maupun mengelola sumber daya sendiri tanpa intervensi pihak manapun (Arianto, 2014). Sebut saja, kesuksesan yang dicapai Ainun Najib, dkk dalam mengembangkan *kawalpemilu.org*. Menurut Onno W Purbo, apa yang dilakukan oleh *kawalpemilu.org* yang dimotori oleh Ainun Najib merupakan wujud perjuangan mengawal demokrasi.³⁰ Oleh karena itu, biarlah mereka menjadi penjaga moral yang bebas berkumpul untuk meluruskan yang bengkok dan setelah tugas itu selesai biarlah kembali ke kesibukan masing-masing.³¹ Hal ini dibenarkan oleh Ainun Najib dari *www.kawalpemilu.org* yang menyatakan jika para relawan politik mendirikan perusahaan secara structural, hal itu dapat membuat nilai-nilai kerelawanan akan semakin terkisis dan dipastikan sulit untuk disatukan kembali.³²

Akhirnya, perlu dirumuskan skema simbiosis-mutualis dalam mewujudkan tujuan praktis yang sejalan dengan cita-cita ideologis antara relawan politik dan Jokowi sebagai sosok pemikat. Hal ini ditujukan untuk membentuk relawan politik sebagai suplemen

demokrasi, bukan substitusi demokrasi yang dapat menjadikan wajah demokrasi semakin suram. Jika hal ini dapat terjadi dalam konteks ke-Indonesia-an, maka dapat dipastikan model demokrasi berkarakter ekstra parlementer akan semakin terlembaga dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aspinall, Edward. (2013). The Triumph of Capital? Class Politics and Indonesian Democratisation. *Journal of Contemporary Asia*. Vol. 43 No. 2, hlm. 226-242.
- . (2014). Agensi dan Kepentingan Massa dalam Masa Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Prisma*. Vol. 33 No. 1.
- Arianto, Bambang. 30 Desember 2014. Fenomena Menjadi Relawan Politik. *Banjarmasin Post*, hlm 10.
- . 5 Agustus 2014. Epilog Kontestasi Presidensial 2014. *Media Indonesia*, hlm 20.
- . 28 April 2014. Impian Zaken Kabinet. *Koran Tempo*, hlm 33.
- Becker, Penny Edgell and Dhingra, Pawan H. (2001). Religious Involvement and Volunteering: Implications for Civil Society. *Journal of Democracy*. Vol. 62 No. 3.
- Bekkers, René. (2005). Participation in Voluntary Associations: Relations with Resources, Personality, and Political. *Political Psychology*. Vol. 26 No. 3 Edisi Juni.
- Budiman, A. et.al (Eds)/ 2001. *Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Choi, N. (2005). *Local Elections and Democracy in Indonesia; The Case of the Riau Archipelago*. Singapore: Intitute of Defence and Strategic Studies (IDSS) Working Paper.
- Cohen, Jean. (1999). *Trust, Voluntary Association and Workable Democracy: The Contemporary American Discourse of Civil Society, in Mark Warren (ed.), Democracy and Trust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eliasoph, Nina. (2013). *The Politics of Volunteering*. Cambridge: Polity Press.

³⁰Lihat, Majalah Tempo. (2014). Onno W. Purbo. Perjuangan mengawal Demokrasi. hlm 90. Dalam Pilpres 2014, banyak situs yang muncul untuk mengawal keabsahan hasil pemilihan. Sebut saja, *c1yanganeh.tumblr.com*; *kawal-suara.appspot.com*; *kawalpilpres.appspot.com*; *realcount.herokuapp.com*; *j.mp/hitungpilpres2014*; *rekapda1.herokuapp.com*; *j.mp/hitungpilpres2014*; *rekapda1.herokuapp.com*; *caturan.com*; *bowoharja.biz*; dan *cross-check.herokuapp.com*. Namun yang paling fenomenal tentu saja *kawalpemilu.org* yang dimotori oleh Ainun Najib dan kawan-kawan.

³¹ Majalah Tempo. 15-21 Desember, 2014. Memelihara Para Relawan. hlm 31.

³² Wawancara Majalah tempo dengan Ainun Najib. Majalah Tempo. 2014. *Kami Orang Terdampar*. hlm 93.

- Fikri AF, Akhmad. (1999). *Menjadi Politisi Ekstra Parlemonter*. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
- Gardono, I. (ed.)/ 2006. *Gerakan Sosial, Wacana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Hasrul, Hanif. (2007). Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 11, No. 1 Edisi Juli.
- Heryanto, Ariel. (2012). *Budaya Populer di Indonesia: Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hidayat, S. (2009). *Pilkada, Money Politics and the Dangers of Informal Governance Practice*, dalam P. Sulistiyanto dan M Erb (ed). Singapore. ISEAS Publishing.
- Kleden, Ignas. 15-21 Desember 2014. Kembalinya Voluntarisme dalam Politik. *Majalah Tempo*.
- Klinken. Gerry Van. (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi. Demokrasi Patronase Indonesia di Tingkat Provinsi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kusuma, N. et.al (Eds)/ 2003. *Gerakan Perlawanan Rakyat, Kasus-kasus Gerakan Rakyat di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST.
- Lim, Merylina. (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi. Internet dan Kekuasaan Politik di Indonesia: Medan-media Baru Pembentukan Identitas*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Marijan, Kacung. (2012.c). *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Prast, Hari. (2014). *Demokratif, Kisah Blusukan Jokowi*. Jakarta: Imprint Kepustakaan Populer Gramedia.
- Patria, Nezar, dan Arif, Andi. (2009). *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono, AE, dkk. (2014). *Media Sosial Alat Gerakan Sipil; Belajar dari Sukses Jakarta dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Public Virtue Institute.
- Power Welfare and Democracy UGM. (2013). *Demokrasi di Indonesia : Antara Patronase dan Populisme*. Hasil Survei. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada.
- Purbo, Onno W. 15-21 Desember 2014. Perjuangan Mengawal Demokrasi. *Majalah Tempo*.
- Qodir, Zuly. 16 Agustus 2014. Orde Kerakyatan untuk Kemandirian. *Harian Kompas*, hlm. 6.
- Savirani, Amalinda. (2015). *Jokowi's supporters are to doubt the 'Indonesian Obama'*. (Online). (<http://theconversation.com/jokowis-supporters-are-starting-to-doubt-the-indonesian-obama-37843>)
- Samah, Kristin dan Susanti, Fransisca Ria. (2014). *Berpolitik Tanpa Partai, Fenomena Relawan Dalam Pilpres*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharko. (2006). *Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 10 No. 1 Edisi Juli.
- Setiawan, Putu. 13 Oktober 2014. Pesta Rakyat. *Koran Tempo*.
- Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Taylor, R.H. (ed.)/1996. *The Politics of Elections in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uhlir, Anders. (1998). *Oposisi Berserak, Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Utomo, Wisnu Prasetyo. (2013). *Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 17 No. 1 Edisi Juli.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. (1995). *Voice and Equality, Civi Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Widodo, Joko. 10 Mei 2014. Revolusi Mental. *Kompas*, hlm 6.
- Wilson, J. (2000). *Volunteering*. *Annual Review of Sociology* 26. hlm 215-240.

Wilson, J. (2012). *Volunteerism Research: A Review Essay*. *Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly*. 41(2), 176-212.

Internet

Al-Rahab, Amiruddin. (2014). *Museumkan Pilpres*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/kolom/2014/07/31/1523>, diakses 25 Desember 2014).

Berita Satu.com. (2014). *Mahasiswa Indonesia Deklarasikan Dukungan Jokowi-JK di Kampus Harvard*. (Online). (<http://beritasatu.com/home/mahasiswa-indonesia-deklarasikan-dukungan-jokowi-jk-di-kampus-harvard/57534>, diakses 2 Januari 2015)

Suryadi, Suhardi. (2014). *Relawan Politik*. (Online). (<http://www.prismaindonesia.com/index.php/editorial/item/325-relawan-politik>, diakses 26 Desember 2014)

Tempo.co (2014). *Relawan Jokowi ada di 31 Negara*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/news/2014/04/03/078567626/Relawan-Jokowi-Ada-di-31-Negara>, diakses 24 Desember 2014).

Tempo.co. (2014). *Perang Kreatif di Balik Kampanye Prabowo dan Jokowi*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/abc/2014/07/04/075616/>

Perang-Karya-Kreatif-di-Balik-Kampanye-Prabowo-dan-Jokowi)

Tempo.co. (2014). *Susun Kabinet Jokowi Minta Masukan Rakyat via Facebook*. (Online). (<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595486/Susun-Kabinet-Jokowi-Minta-Masukan-Rakyat-via-Facebook>, diakses 25 Desember 2014)

The Jakarta Post. (2014). *Volunteers a Key Factor in Fight for Swing Voters*. (Online). (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/02/volunteers-a-key-factor-fight-swing-voters.html>, diakses 25 Desember 2014)

The Jakarta Post. (2014). *Jokowi Goes Online for Cabinet*. (Online). (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/25/jokowi-goes-online-cabinet.html>, diakses 25 Desember 2014)

The Jakarta Post. (2014). *Overseas voter turnout up by 83%, says PPLN*. (Online). (<http://www.thejakartapost.com/news/2014/07/17/overseas-voter-turnout-83-says-ppln.html>, diakses 2 Januari 2015)

Majalah

Majalah Tempo. 15-21 Desember 2014. *Opini Memelihara Para Relawan*. Tempo. hlm. 31.